

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia termasuk dalam negara yang sedang berkembang. Sebagai negara berkembang istilah pembangunan sudah tidak lagi asing ditelinga karena memang negara berkembang pasti akan melakukan upaya pembangunan bagi negaranya agar memberikan manfaat positif bagi masyarakatnya. Pembangunan sendiri memiliki makna yaitu proses memajukan atau memperbaiki suatu keadaan melalui berbagai proses memajukan atau memperbaiki suatu keadaan melalui berbagai tahap secara terencana dan berkesinambungan (Cobyers dan Hills dalam Huraerah, 2008:12). Terdapat kata kunci dari pengertian pembangunan yaitu merupakan suatu proses, memiliki tujuan memajukan serta dilaksanakan terencana dan berkesinambungan. Sebagai suatu proses jelas bahwa pembangunan memerlukan waktu untuk proses pelaksanaannya dan untuk mengetahui hasil dari pembangunan. Tujuan yang ingin dicapai adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan memiliki arti bahwa sebelum pembangunan dilakukan terlebih dahulu dilakukan perencanaan dengan berbagai pertimbangan agar diketahui tahapan langkah pembangunan yang harus dilakukan untuk pencapaian tujuan pembangunan.

Indonesia memiliki potensi-potensi yang diunggulkan untuk pembangunan itu sendiri. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam baik itu dari hasil pertanian/perkebunan, pertambangan, dan perikanan. Dari segi geografis Indonesia juga beragam mulai dari daerah pesisir pantai dan pegunungan ada

semua di Indonesia. Dengan potensi alam ini Indonesia memiliki banyak tempat wisata yang menjadi tujuan wisata baik wisnus (wisatawan nusantara) maupun wisman (wisatawan mancanegara). Pariwisata merupakan sektor penting dari pembangunan ekonomi karena kepariwisataan sangat erat kaitannya dengan semua sektor ekonomi, sehingga banyak memberikan kontribusi penting bagi perekonomian. Sektor pariwisata merupakan penghasil devisa keempat pada tahun 2010, untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Devisa Indonesia tahun 2008-2010

No	Jenis Komoditi	2008	2009	2010
1.	Minyak & gas bumi	29.126,30	19.018,30	28.039,60
2.	Minyak kelapa sawit	12.375,57	10.367,62	13.468,97
3.	Karet olahan	7.579,66	4.870,68	9.314,97
4.	Pariwisata	7.377,00	6.298,02	7.603,45
5.	Pakaian jadi	6.092,06	5.735,60	6.598,11
6.	Alat listrik	5.253,74	4.580,18	6.337,50
7.	Tekstil	4.127,97	3.602,78	4.721,77
8.	Kertas dan barang dari kertas	3.796,91	3.405,01	4.241,79
9.	Makanan olahan	2.997,17	2.960,73	3.620,86
10.	Kayu olahan	2.821,34	2.275,32	2.870,49
11.	Bahan kimia	2.754,30	2.155,41	3.381,85

Sumber: Konferensi Pariwisata Nasional, 2011.

Pariwisata mempunyai peran penting dalam pembangunan. Selain sebagai penghasil devisa juga meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat, membuka peluang dan kesempatan kerja serta memperkokoh persatuan dan kesatuan sekaligus pengenalan budaya. Efek ganda pariwisata mempunyai kaitan ekonomi kebelakang dengan sektor pendukung atau penunjang berkaitan dengan suplai barang dan jasa yang dibutuhkan usaha pariwisata. Sedang efek berikutnya adalah munculnya kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan wisatawan secara langsung oleh masyarakat (Buku Statistik Pariwisata Kota Batu 2012, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu).

Kota Batu adalah salah satu daerah otonom di Indonesia yang cukup pesat dalam mengembangkan potensi pariwisatanya. Sesuai dengan visi dari Kota Batu tahun 2012-2017 yaitu “Kota Batu Sentra Pertanian Organik Berbasis Kepariwisataan Internasional”. Dengan dukungan topografi–sarana dan prasarana yang memadai menjadikan Kota Batu sebagai salah satu tujuan untuk menghabiskan waktu libur, sehingga Kota Batu dijuluki sebagai *the real tourism city of Indonesia* oleh Bappenas. Keinginan ini didukung dengan upaya pengembangan pariwisata yang ada dan pembangunan tempat wisata yang baru agar tempat tujuan wisata bagi para wisatawan semakin beragam. Disisi lain pariwisata juga merupakan penghasil PAD terbesar di Kota Batu yaitu mencapai 65% (Jibi, 2012). Daya tarik utama wisata di Kota Batu adalah wisata alam karena memang berada pada daerah pegunungan dengan udara yang sejuk cocok untuk dijadikan tempat beristirahat. Ikon utama dari Kota Batu adalah buah apel batu. Tetapi karena semakin berkembangnya Kota Batu semakin banyak bangunan berdiri menyebabkan semakin berkurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan memberi dampak pada meningkatnya suhu di Kota Batu. Buah apel batu yang tepat ditanam pada daerah bersuhu sejuk menjadi semakin berkurang produksinya. Selain disebabkan karena suhu yang meningkat juga kesuburan tanah di Kota Batu menurun dan telah tercemar pestisida.

Melihat pergeseran daerah tujuan wisata dari wisata ke negara-negara maju, sekarang tren pariwisata bergeser pada daerah-daerah di Asia. Jenis pariwisata yang saat ini juga sedang gencar dikembangkan adalah mengenai desa wisata. Desa wisata merupakan suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan

suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya: atraksi, akomodasi, makanan-minuman, dan kebutuhan wisata lainnya (Priasukmana, 2001: 38). Demikian pula dengan Kota Batu upaya untuk mengembangkan desa wisata juga semakin digiatkan. Bahkan Pemerintah Kota Batu juga telah mendapatkan dana sebesar 2 milyar rupiah untuk pengembangan desa wisata oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Widianto, 2012). Salah satu desa wisata yang dikembangkan berada pada desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Desa Punten menjadi salah satu desa pusat dan percontohan pengembangan desa wisata di Kota Batu. Desa wisata Punten mengedepankan wisata yang berhubungan dengan pertanian sehingga dapat pula disebut desa agrowisata. Wahana wisata yang disajikan pada desa Punten misalnya saja wisata petik apel dan jeruk, *homestay*, *trail adventure*, wisata kesenian (Kuda Lumping, tari Bambu Gila, dan tari Santar), berkuda, *camping* dan *out bound area*.

Pemerintah daerah di Indonesia berhak menentukan arah pembangunannya sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki merupakan efek dari penerapan asas desentralisasi. Desentralisasi memiliki makna penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 32 tahun 2004 BAB I sub 7). Demikian pula dengan Pemkot

Batu mengutamakan pembangunan yang dikonsentrasikan pada sektor pertanian dan pariwisata karena memang kedua sektor ini yang menjadi unggulan. Maka pembangunan yang dilakukan juga diutamakan pada kedua sektor ini agar nantinya juga memberi dampak positif pada sektor-sektor lain. Walaupun pembangunan sudah diserahkan pada pemerintah daerah, tetapi peranan dari pemerintah pusat juga tetap diperlukan. Dalam pembangunan pariwisata pemerintah pusat mengambil langkah dengan dilaksanakannya PNPM Mandiri Pariwisata.

PNPM Mandiri Pariwisata ditujukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat di wilayah pedesaan yang memiliki potensi dan sumber daya pariwisata untuk menciptakan lapangan kerja dan usaha masyarakat dibidang pariwisata. PNPM Mandiri bidang Pariwisata merupakan bagian dari pelaksanaan PNPM Mandiri yang dilaksanakan di Desa Wisata. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan sarana prasarana pendukung dalam upaya menumbuhkembangkan usaha ekonomi masyarakat yang terkait langsung dan tak langsung dengan kegiatan pariwisata dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, antara lain melalui: Bantuan Langsung Masyarakat/Bansos, Pendampingan PNPM Mandiri Bidang Pariwisata, Pembuatan Informasi Desa Wisata, Penyerahan PNPM Mandiri Bidang Pariwisata, Fasilitasi Komunikasi Jejaring Desa Wisata, Fasilitasi Pemanfaatan *Corporate Social Responsibility* dalam Rangka Pengembangan Desa Wisata, Fasilitasi Pemanfaatan KUR dalam Rangka Pengembangan Desa Wisata, Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat, Temu Nasional PNPM Mandiri Pariwisata, Penghargaan Desa Wisata (PNPM Pariwisata) (Konferensi Pariwisata Nasional, 2011b).

Pembangunan yang dilakukan memerlukan kerjasama dari seluruh aktor baik pemerintah, swasta dan masyarakat. Ketiga aktor merupakan mitra pembangunan yang harus saling membantu agar tujuan pembangunan tercapai. Kemitraan adalah suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas disuatu bidang usaha tertentu, atau

tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik (Sulistiyani, 2004:130). Kemitraan perlu dilakukan antara semua pihak karena masing-masing pihak memiliki kekuatan, kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Dalam kemitraan pihak yang bermitra adalah pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pihak pemerintah berhak dalam regulasi, tetapi memiliki kekurangan dalam dana, SDM, dan manajemen. Pihak swasta memiliki kekuatan dalam dana tetapi tidak memiliki kekuatan dalam hal regulasi. Sedangkan pihak masyarakat merupakan pihak dengan jumlah terbesar tetapi lemah dalam regulasi, dana, teknologi, dan manajemen.

Proses pembangunan masyarakat tidak lagi hanya sebagai objek dalam pembangunan tetapi juga sebagai subyek yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan (Gaventa dan Valderama dalam Huraerah, 2008: 99). Sebagai subyek masyarakat merupakan mitra dari dinas-dinas atau pihak-pihak terkait lainnya. Masyarakat tidak lagi hanya sebagai pelaksana dari kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, tetapi masyarakat juga bisa ikut berpartisipasi dalam penentuan arah pembangunan. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan mental dan emosi orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyumbangkan pada tujuan-tujuan kelompok dan sama-sama bertanggung jawab terhadapnya (Keith Davis dalam Huraerah, 2008: 95). Partipasi masyarakat sangat penting dalam proses pembangunan. Kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tidak akan berjalan dengan sempurna bila masyarakat tidak ikut ambil bagian dalam implementasinya. Lagipula pembangunan yang dilakukan akan berdampak pada masyarakat secara langsung baik secara positif maupun negatif.

Oleh karena itu masyarakat harus turut berpartisipasi agar pembangunan yang dilakukan akan memberikan dampak positif dan minim dampak negatif.

Mengembangkan desa wisata sangat memerlukan peran serta dari masyarakat desa. Tidak dipungkiri bahwa masyarakat desa yang akan bertemu langsung dengan para wisatawan dan tentunya akan menimbulkan kesan pada wisatawan. Bila pelayanan yang diberikan oleh warga memuaskan tentu akan memberikan kesan yang baik bagi wisatawan dan kemungkinan besar wisatawan akan kembali lagi berkunjung dan menambah wisatawan baru. Bagi desa yang awalnya belum digunakan sebagai tempat wisata tentu masyarakatnya akan merasa kesulitan dan kebingungan saat ada wisatawan. Untuk mengatasi kesulitan dalam pengelolaan desa wisata diperlukan bantuan dari dinas-dinas terkait untuk memberikan pelatihan dalam pengelolaan desa wisata, bagaimana pengembangan desa wisata, mengolah kerajinan asli daerah, menciptakan wahana wisata baru, dan sikap dalam menjamu para wisatawan. Dalam hal kepariwisataan, dinas yang sangat berkaitan erat dengan desa wisata di Kota Batu adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu. Dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu 2007-2012 ditetapkan sasaran pembangunan kepariwisataan yaitu:

- 1) Terwujudnya pariwisata Kota Batu yang dapat mendorong cinta tanah air.
- 2) Meningkatnya pemerataan dan keseimbangan pengembangan pariwisata yang sesuai dengan potensi masing-masing desa dan kelurahan.
- 3) Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Kota Batu.
- 4) Meningkatnya produk pariwisata yang memiliki keunggulan kompetitif.
- 5) Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat.

Pengembangan pariwisata terutama desa wisata tidak dapat dilakukan oleh salah satu pihak saja. Pemerintah, swasta, maupun masyarakat berjalan sendiri-sendiri untuk mewujudkan desa wisata tidak akan berhasil. Ketidakberhasilan ini disebabkan karena setiap pihak memiliki tugas/peranan, kekurangan serta kelebihan masing-masing. Maka diperlukan kemitraan/kerjasama antara semua pihak untuk mewujudkan desa wisata.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam pengembangan desa wisata memerlukan peranan dari seluruh pihak, baik dari masyarakat, pemerintah dan swasta. Berdasarkan dari pemaparan yang telah disampaikan diatas maka penulis berkeinginan untuk mengetahui dan menganalisis peranan antara pihak yang bermitra dalam pengembangan kemitraan pariwisata yang dikhususkan pada mengembangkan desa wisata. Desa wisata yang akan dijadikan lokasi penelitian terdapat pada desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Sedangkan pihak yang bermitra adalah antara pihak pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian judul dari proposal skripsi ini adalah “Kemitraan Pemerintah dan Masyarakat dalam Mengembangkan Desa Agrowisata (Studi dalam Mengembangkan Desa Wisata di Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu)”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan desa agrowisata di Punten?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan desa agrowisata di Punten?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada dasarnya adalah memecahkan masalah yang telah dirumuskan (Moleong, 2004:98). Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan desa agrowisata di Punten.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan desa agrowisata di Punten.

D. Kontribusi Penelitian

Kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi Akademis

Dapat menambah ilmu dan teori mengenai kemitraan pengembangan desa wisata yang terdapat dalam skripsi ini. Ilmu dapat digunakan bagi penulis maupun pihak lain yang membutuhkan teori yang ada dalam skripsi ini.

2. Kontribusi Praktis

Dapat dijadikan sebagai acuan atau bahan informasi dan menambah wawasan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan desa wisata.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang merupakan rangkaian antara bab yang satu dengan lainnya. Adapun penulisan sistematika ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dikemukakan mengenai hal-hal-hal yang menjadi latar belakang penulis melakukan penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kontribusi diadakannya penelitian ini. Rumusan masalah dibuat dengan tujuan agar penelitian lebih berfokus pada masalah yang dibuat dan tidak melebar pada permasalahan yang lainnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan landasan teori yang nantinya akan membantu peneliti dalam proses pengolahan atau analisis data. Dalam bab ini diuraikan tentang administrasi publik, administrasi pembangunan, partisipasi masyarakat, kemitraan, pariwisata, dan desa wisata. Teori yang digunakan merupakan kutipan dari pendapat ahli baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang akan digunakan serta langkah-langkah teknis dan praktis sehingga tujuan penelitian diperoleh. Bab ini terdiri dari jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, keabsahan data, dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menguraikan tentang gambaran umum yang meliputi data fokus

pembahasan yang diperoleh selama penelitian. Penyajian data umum yang merupakan gambaran pada lokasi penelitian yang disusun menurut keperluan penilaian serta penyajian data fokus yang disesuaikan dengan fokus penelitian kemudian membahasnya.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan terhadap pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, beserta saran yang dapat penulis berikan pada permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

1. Pengertian Administrasi

Kata administrasi sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat. Ada banyak hal yang dikaitkan dengan administrasi. Secara etimologis istilah administrasi berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata *administration* yang bentuk infinitifnya adalah *to administer*. Dalam Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English (1974), kata *to administer* diartikan sebagai *to manage* (mengelola) atau *to direct* (menggerakkan) (Silalahi, 2007: 2-3).

Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha kerja sama demi tercapainya tujuan yang ditentukan sebelumnya (Siagian dalam Silalahi, 2007: 9). *Administration may be defined as the organization and direction of human and material resources to achieve desired ends.* (Administrasi dapat didefinisikan sebagai pengorganisasian dan pengarahan sumber-sumber tenaga kerja dan materi untuk mencapai tujuan akhir yang dikehendaki). Pengertian ini diungkapkan oleh Pfiffner dalam Badri (1988: 10).

Kata publik pada dasarnya berasal dari bahasa Inggris "*public*" yang berarti umum, rakyat umum, orang banyak dan rakyat. Syafi'ie dalam Pasolong (2008:6) mengatakan bahwa publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki.

Frederickson dalam Pasolong (2008: 6-7) menjelaskan konsep “publik” dalam lima perpektif, yaitu:

- a. Publik sebagai kelompok kepentingan, yaitu publik dilihat sebagai manifestasi dari interaksi kelompok yang melahirkan kepentingan masyarakat.
- b. Publik sebagai pemilih yang rasional, yaitu masyarakat terdiri atas individu-individu yang berusaha memenuhi kebutuhan dan kepentingan sendiri.
- c. Publik sebagai perwakilan kepentingan masyarakat, yaitu kepentingan publik diwakili melalui “suara”.
- d. Publik sebagai konsumen, yaitu konsumen sebenarnya tidak terdiri dari individu-individu yang tidak berhubungan satu sama lain, namun dalam jumlah yang cukup besar mereka menimbulkan tuntutan pelayanan birokrasi. Karena itu posisinya juga dianggap sebagai publik.
- e. Publik sebagai warga negara, yaitu warga negara dianggap sebagai publik karena partisipasi masyarakat sebagai keikutsertaan warga negara dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dipandang sebagai sesuatu yang paling penting.

2. Administrasi Publik

Administrasi publik sama artinya dengan administrasi negara. Dalam buku-buku mengenai administrasi ada yang menggunakan istilah administrasi publik atau administrasi negara. Administrasi negara adalah manajemen dan organisasi daripada manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan-tujuan pemerintah (Waldo dalam Badri, 1988: 22).

Fungsi dasar dari administrasi negara ada 3, yaitu:

- a. Merumuskan kebijaksanaan publik, misalnya: pemerataan, pertumbuhan ekonomi/kemakmuran, keamanan dan seterusnya dimana prosesnya antara lain: analisa keadaan sekarang, alternatif-alternatif perubahan di masa depan, penyusunan strategi/taktik/program/kegiatan, dan akhirnya keputusan.
- b. Pengendalian perilaku organisasi dan perilaku anggota organisasi publik: meliputi struktur organisasi, kepegawaian, keuangan, perbekalan, tatausaha kantor dan hubungan masyarakat.
- c. Penggunaan teknologi manajemen publik: meliputi kepemimpinan, komunikasi, koordinasi dan pengawasan (Badri, 1988: 25).

Berdasarkan fungsi dasar dari administrasi publik dapat diketahui bahwa administrasi negara memiliki perhatian terhadap masalah publik baik dari segi pemerintahan dan juga proses mengorganisasikan masyarakat. Administrasi publik memiliki cakupan perhatian yang sangat luas, tidak hanya masalah tata pemerintahan saja, tetapi juga menyangkut masalah-masalah sosial dan juga cara mengatasi masalah tersebut. Lebih lanjut Chandler dan Plano dalam Pasolong (2008: 7) memberi penjelasan mengenai administrasi publik sebagai berikut:

Administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk menformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Dijelaskan lebih lanjut administrasi publik merupakan seni dan ilmu (*art and science*) yang ditujukan untuk mengatur "*public affairs*" dan melaksanakan berbagai tugas yang ditentukan. Administrasi publik sebagai disiplin ilmu bertujuan untuk memecahkan masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama dibidang organisasi, sumber daya manusia dan keuangan.

B. Administrasi Pembangunan

1. Pengertian Pembangunan

Kata pembangunan sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat. Secara umum, kata pembangunan adalah suatu proses perubahan nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat menuju kearah perubahan yang lebih baik secara berencana dan berkesinambungan untuk kesejahteraan masyarakat (Huraerah, 2008: 12). Bryant dan White dalam Ndraha (1990:15-16) mengungkapkan pembangunan ialah upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya. Ada lima implikasi utama definisi tersebut:

- a. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia baik individu maupun kelompok (*capacity*).
- b. Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan dan pemerataan sistem nilai dan kesejahteraan (*equity*).

- c. Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih, dan kekuasaan untuk memutuskan (*empowerment*).
- d. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri (*sustainability*).
- e. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan negara yang satu dengan negara yang lain dengan menciptakan hubungan saling menguntungkan dan saling menghormati (*interdependence*).

Pelaksanaan dari pembangunan tidak serta merta langsung dilakukan.

Terlebih dahulu dilakukan perencanaan agar pelaksanaan pembangunan dapat terarah dan memudahkan dalam pencapaian tujuan pembangunan. Dalam pembangunan terdapat beberapa pendekatan yang mendasari pembangunan dilaksanakan. Neil dalam Huraerah (2008:12-20) mengemukakan beberapa pendekatan pembangunan, yaitu:

- a. Pendekatan Kebutuhan Dasar (*Basic Needs Approach*)
Pendekatan kebutuhan dasar adalah sebagai kebijakan pembangunan, baik dalam setiap negara khususnya dan dunia pada umumnya seharusnya dapat memenuhi kebutuhan dasar bagi seluruh penduduknya. Terdapat 3 jenis kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap negara, yaitu: (1) konsumsi bahan-bahan pokok tertentu seperti sandang, pangan, papan; (2) pelayanan pokok seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dll; (3) hak untuk berpartisipasi dalam membuat dan melaksanakan program yang berpengaruh terhadap pengembangan pribadi.
- b. Pendekatan Pembangunan Nasional (*Social Development Approach*)
Pembangunan nasional tidak terkait dengan individu, melainkan memfokuskan pada komunitas atau pada masyarakat serta pada proses dan struktur sosial secara luas. Oleh karena itu, pembangunan sosial bersifat komprehensif dan universal. Pembangunan sosial bersifat dinamis, yakni mendorong dan meningkatkan proses pertumbuhan dan perubahan.
- c. Pendekatan Kesejahteraan Sosial (*Social Welfare Approach*)
Kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan manusia yang baik atau sejahtera yang wujudnya apabila masalah-masalah sosial terkendali, apabila kebutuhan-kebutuhan manusia terpenuhi, apabila kesempatan-kesempatan sosial dimaksimalkan. Jika ketiga hal tersebut telah dicapai oleh individu, keluarga atau masyarakat, maka mereka telah mencapai yang dinamakan tingkat kesejahteraan.

2. Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan yang dikembangkan berasal dari disiplin ilmu yang mendahuluinya yaitu administrasi negara (Tjokroamidjojo, 1995:1). Administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupannya sebagai suatu bangsa, dalam pelbagai aspek kehidupan bangsa tersebut, dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan (Siagian dalam Badri, 1988:43).

Administrasi pembangunan adalah suatu administrasi bagi usaha pembangunan sosial ekonomi. Secara spesifik administrasi pembangunan mempunyai fungsi untuk perumusan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program pembangunan (kearah modernisasi pembangunan bangsa atau pembangunan sosial ekonomi) dan pelaksanaannya secara efektif (Tjokroamidjojo dalam Badri, 1988:43).

Ciri-ciri dari administrasi pembangunan sebagai berikut:

- a. Lebih memberikan perhatian terhadap lingkungan masyarakat yang berbeda-beda, terutama bagi lingkungan masyarakat negara-negara baru berkembang.
- b. Administrasi pembangunan mempunyai peran aktif dan berkepentingan (*committed*) terhadap tujuan-tujuan pembangunan, baik dalam perumusan kebijaksanaannya maupun dalam pelaksanaan yang efektif. Bahkan administrasi ikut serta mempengaruhi tujuan-tujuan pembangunan masyarakat dan menunjang pencapaian tujuan-tujuan sosial, ekonomi dan lain-lain yang dirumuskan kebijaksanaannya melalui proses politik.
- c. Justru berorientasi kepada usaha-usaha yang mendorong perubahan-perubahan (*inovasi*) ke arah keadaan yang dianggap lebih baik untuk usaha masyarakat dimasa depan. Berorientasi ke masa depan.
- d. Lebih berorientasi kepada pelaksanaan tugas-tugas pembangunan (*development function*) dari pemerintah. Dalam hal ini adalah kemampuan untuk merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan dan pelaksanaan yang efektif seperti telah disebutkan terdahulu. Yang terakhir juga dapat disebutkan sebagai kemampuan dan

pengendalian instrumen-instrumen bagi pencapaian tujuan-tujuan pembangunan. Administrasi pembangunan lebih bersikap sebagai “*development agent*”

- e. Administrasi pembangunan harus mengkaitkan diri dengan substansi perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan tujuan-tujuan pembangunan diberbagai bidang yaitu ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Dengan perkataan lain administrasi dari kebijaksanaan dan isi program-program pembangunan.
- f. Dalam administrasi pembangunan administrator dalam aparatur pemerintah juga bisa merupakan penggerak perubahan (*change agents*).
- g. Lebih berpendekatan lingkungan (*ecological approach*), berorientasi pada kegiatan (*action oriented*) dan bersifat pemecahan masalah (*problem solving*) (Tjokroamidjojo, 1995: 9-10).

C. Partisipasi Masyarakat

1. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Kata partisipasi memiliki sinonim dengan keikutsertaan, keterlibatan, dan peran. Menurut Davis dalam bukunya yang berjudul “*Human Relations at Work*” mengungkapkan definisi sebagai berikut:

“*Participation can be defined as mental and emotional involvement of a person in group situations which encourages him to contribute to group goals and share responsibility for them*” (Partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang didalam situasi kelompok yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan) (Sastropetro, 1988: 13).

Mubyarto dalam Huraerah (2008: 96) mengatakan pengertian partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam suatu proses pembangunan dimana masyarakat ikut terlibat mulai dari tahap penyusunan program, perencanaan dan pembangunan, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Kemudian, dengan mengutip beberapa pendapat ahli barat, Ndraha dalam Huraerah (2008: 96) mengatakan partisipasi masyarakat meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Partisipasi dalam melalui kontak dengan pihak lain (*contact change*) sebagai satu diantara titik awal perubahan sosial.
- b. Partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (menaati, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya).
- c. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan termasuk pengambilan keputusan (penetapan rencana).
- d. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan.
- e. Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan (*participation in benefit*).
- f. Partisipasi dalam menilai hasil pembangunan.

Dalam kerangka pembangunan partisipatif, Sumodiningrat (2006: 219)

mengajukan 5 prinsip yang dapat dipakai sebagai pegangan, yakni:

- a. Kebijakan pembangunan harus berpihak pada kepentingan masyarakat.
- b. Pedoman pembangunan harus sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat.
- c. Mekanisme perencanaan pembangunan merupakan perpaduan antara *top down* dan *bottom up*.
- d. Tim koordinator dan pengendali harus terkoordinasi antara sektor dan antar wilayah.
- e. Instrument pembangunan harus menjunjung tinggi keberpihakan pada rakyat.

2. Pengelompokan Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan memiliki pengelompokan-pengelompokan berdasarkan pada pihak yang melaksanakan, jenis kegiatan yang dilakukan dan tujuan berpartisipasi. Jika dikaitkan dengan praktik pembangunan masyarakat yang demokratis, terdapat tiga konsep partisipasi, yaitu:

- a. Partisipasi politik: representasi dalam demokrasi. Tujuannya untuk mempengaruhi dan mendudukkan wakil rakyat dalam lembaga pemerintahan daripada melibatkan langsung masyarakat dalam proses-proses pemerintahan.
- b. Partisipasi sosial: keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Masyarakat dipandang sebagai '*beneficiary*' pembangunan dalam konsultasi atau pengambilan keputusan dalam semua tahapan siklus proses pembangunan dari penilaian kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan sampai pemantauan dan evaluasi program. Dengan demikian, partisipasi diletakkan diluar lembaga formal pemerintahan seperti forum warga.

- c. Partisipasi warga: pengambilan keputusan langsung dalam kebijakan publik. Warga berpartisipasi secara langsung dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Partisipasi menempatkan masyarakat tidak hanya sebagai penerima (objek), tetapi sebagai subjek dari kegiatan pembangunan yang dilakukan (Gaventa dan Valderama dalam Huraerah, 2008: 99).

Tujuan dari pelaksanaan partisipasi masyarakat dapat bermacam-macam.

Najib dalam Huraerah (2008: 100) mengelompokkan partisipasi jika dilihat dari penggunaannya, sebagai berikut:

- a. Partisipasi sebagai alat
Melalui partisipasi, pemerintah diharapkan mampu menyusun berbagai kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan warga, serta mampu mendorong pengelolaan pemerintahan yang transparan, efektif, bertanggung jawab, dan efisien.
- b. Partisipasi sebagai tujuan
Setiap warga negara memiliki hak untuk terlibat dalam penyusunan berbagai kebijakan yang diharapkan berdampak pada kehidupannya. Partisipasi merupakan salah satu aspek dari kehidupan bernegara, dimana warga memiliki hak untuk terlibat dalam proses penyusunan serta pengambilan keputusan berbagai kebijakan.

Jika melihat proses partisipasi masyarakat, terdapat tingkatan-tingkatan yang membedakannya. Billah dalam Huraerah (2008:101-102) memperjelas pemahaman dari ketiga tingkatan partisipasi masyarakat tersebut sebagai berikut:

- a. Tahapan *inisiasi* adalah tahapan ketika gagasan melakukan sesuatu (proyek pembangunan) muncul, baik pada seorang maupun pada kelompok didalam komunitas. Gagasan itu kemudian ditularkan (proses *sharing*) kelingkup yang lebih luas melalui perangkat yang ada didalam komunitas, misalnya saja kepala desa, ketua RT/RW, pimpinan informal, para kepala keluarga, atau kelompok informal.
- b. Tahapan *legitimasi* adalah tahapan dimana gagasan (untuk melakukan kegiatan pembangunan) memperoleh keabsahan dari komunitas yang

bersangkutan. Keabsahan itu dapat diperoleh melalui perundingan maupun musyawarah, baik yang bersifat informal maupun formal. Perundingan informal adalah perundingan/diskusi yang terjadi secara tidak resmi yang biasa di masjid, surau, warung, atau di tempat orang berkumpul. Sedangkan perundingan formal terjadi secara resmi melalui rapat-rapat di RT/RW atau rembug desa di balai desa yang dipimpin oleh kepala desa.

- c. Tahapan *eksekusi* adalah tahapan dimana semua kegiatan untuk mewujudkan proyek (pembangunan) dilaksanakan. Pada umumnya tahapan ini dilakukan melalui suatu proses perencanaan, implementasi, pengendalian, monitoring dan evaluasi.

3. Bentuk dan Jenis Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat sendiri memiliki bentuk dan jenis yang berbeda-beda tergantung dari kegiatan yang dilakukan dan siapa pelakunya. Sulaiman dalam Huraerah (2008:103) membagi bentuk-bentuk partisipasi sosial ke dalam 5 (lima) macam, yaitu:

- a. Partisipasi langsung dalam kegiatan bersama secara fisik dan tatap muka.
- b. Partisipasi dalam bentuk iuran uang atau barang dalam kegiatan partisipatori, dana, dan sarana sebaiknya datang dari dalam masyarakat sendiri. Kalaupun terpaksa diperlukan dari luar, hanya bersifat sementara dan sebagai umpan.
- c. Partisipasi dalam bentuk dukungan.
- d. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
- e. Partisipasi *representative* dengan memberikan kepercayaan dan mandat kepada wakil-wakil yang duduk dalam organisasi atau panitia.

Lebih lanjut Davis dalam Sastropetro (1988: 16) mengemukakan bentuk partisipasi sebagai berikut:

- a. Konsultasi, biasanya dalam bentuk jasa.
- b. Sumbangan spontan berupa uang dan barang.
- c. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan donornya berasal dari sumbangan dari individu/instansi yang berada di luar lingkungan tertentu (dermawan pihak ketiga).
- d. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari, dan dibiayai seluruhnya oleh komuniti (biasanya diputuskan oleh rapat komuniti a.l rapat desa yang menentukan anggarannya).
- e. Sumbangan dalam bentuk kerja, yang biasanya dilakukan oleh tenaga ahli setempat.
- f. Aksi massa.
- g. Mengadakan pembangunan dikalangan keluarga desa sendiri.
- h. Membangun proyek komuniti yang bersifat otonom.

Hamijoyo dan Iskandar dalam Huraerah (2008: 102-103) memperinci jenis partisipasi sebagai berikut:

- a. *Partisipasi buah pikiran*, yang diberikan partisipan dalam *anjang sono*, pertemuan atau rapat.
- b. *Partisipasi tenaga*, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain, dan sebagainya.
- c. *Partisipasi harta benda*, yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain, dan sebagainya.
- d. *Partisipasi ketrampilan dan kemahiran*, yang diberikan orang untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industri.
- e. *Partisipasi sosial*, yang diberikan orang sebagai tanda keguayuban, misalnya turut arisan, koperasi, layad (dalam peristiwa kematian), kondangan (dalam peristiwa pernikahan), nyam-bungan, mulang sambung.

Partisipasi bisa dibangun melalui cara memberikan stimulasi kepada masyarakat melalui proyek-proyek pembangunan dan memberikan pendidikan secara terus-menerus untuk menanamkan kesadaran akan perlunya pembangunan. Masyarakat harus diberikan kebebasan dan tanpa ada tekanan serta paksaan untuk ikut ambil bagian dalam proses pembangunan (Huraerah, 2008:104).

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Upaya pelaksanaan partisipasi masyarakat tidak selamanya berjalan dengan lancar. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi dari pelaksanaan partisipasi masyarakat seperti yang diungkapkan Darjono dalam Sastropetro (1988: 22), yaitu:

- a. Pendidikan, kemampuan membaca dan menulis, kemiskinan, kedudukan sosial dan percaya terhadap diri sendiri.
- b. Faktor lain adalah penginterpretasian yang dangkal terhadap agama.
- c. Kecenderungan untuk menyalahartikan motivasi, tujuan dan kepentingan organisasi penduduk yang biasanya mengarah kepada timbulnya persepsi yang salah terhadap keinginan dan motivasi serta organisasi penduduk seperti halnya terjadi di beberapa negara.
- d. Tersedianya kesempatan kerja yang lebih baik di luar pedesaan.
- e. Tidak terdapatnya kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai program pembangunan.

5. Pentingnya Partisipasi Masyarakat

White dalam Sastropetro (1988: 32-33) mengungkapkan alasan pentingnya partisipasi masyarakat. Pernyataan ini diambil dari tulisan White yang berjudul *"Introduction to Community Participation"*. Adapun alasan tentang pentingnya partisipasi sebagai berikut:

- a. Dengan partisipasi lebih banyak hasil kerja yang dapat dicapai.
- b. Dengan partisipasi pelayanan atau *service* dapat diberikan dengan biaya yang murah.
- c. Partisipasi memiliki nilai dasar yang sangat berarti untuk peserta, karena menyangkut kepada harga dirinya.
- d. Partisipasi merupakan katalisator untuk pembangunan selanjutnya.
- e. Partisipasi mendorong timbulnya rasa tanggung jawab.
- f. Partisipasi menjamin, bahwa suatu kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat telah dilibatkan.
- g. Partisipasi menjamin, bahwa pekerjaan dilaksanakan dengan arah yang benar.
- h. Partisipasi menghimpun dan memanfaatkan berbagai pengetahuan yang terdapat didalam masyarakat, sehingga terjadi perpaduan berbagai keahlian.
- i. Partisipasi membebaskan orang dari kebergantungan kepada keahlian orang lain.

- j. Partisipasi lebih menyadarkan manusia terhadap penyebab dari kemiskinan, sehingga menimbulkan kesadaran terhadap usaha untuk mengatasinya.

D. Kemitraan

1. Pengertian Kemitraan

Kata kemitraan jika dilihat dari prespektif etimologis diadaptasi dari kata *partnership*, dan berasal dari akar kata *partner*. *Partner* dapat diterjemahkan “pasangan, jodoh, sekutu atau kompanyon”. Sedangkan *partnership* diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian. Bertolak dari sini maka kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik (Sulistiyani, 2004: 129).

Kemitraan dapat terbentuk apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. ada dua pihak atau lebih,
- b. memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan,
- c. ada kesepakatan,
- d. saling membutuhkan (Sulistiyani, 2004: 130).

2. Maksud dan Tujuan

Hafsah (2000: 62-63) mengatakan pada dasarnya maksud dan tujuan dari kemitraan adalah “*Win-win Solution Partnership*”. Kesadaran dan saling menguntungkan disini tidak berarti para partisipan dalam kemitraan tersebut harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama, tetapi yang lebih dipentingkan adalah adanya posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing.

Menurut Hafsah (2000: 63), dalam kondisi yang ideal tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan secara lebih konkret adalah:

- a. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat.
- b. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan.
- c. Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil.
- d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah dan nasional.
- e. Memperluas kesempatan kerja.
- f. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

Konsep kemitraan yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep kemitraan dalam pengembangan pariwisata antara pihak pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Berdasarkan kondisi ideal yang diungkapkan oleh Hafsah (2000: 63) maka tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan pariwisata adalah:

- a. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan.
- b. Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pedesaan, wilayah dan nasional.
- d. Memperluas kesempatan kerja.
- e. Dapat meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

3. Langkah-langkah Kemitraan

Kemitraan agar terlaksana dengan lancar dan tercapainya tujuan terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan. Adapun langkah-langkah kemitraan menurut Kamil (hal 11-12) sebagai berikut:

- a. Identifikasi Intern Lembaga
Pada tahapan ini lembaga mengidentifikasi komponen-komponen yang belum dimiliki untuk penyelenggaraan program yang akan menjadi kebutuhan program, langkah awal yang harus dilakukan lembaga menilai komponen apa yang harus ada pada penyelenggaraan program tersebut. Contoh dalam penyelenggaraan program pelatihan peningkatan kualitas produksi, yang harus disiapkan diantaranya: gedung, perlengkapan,

bahan ajar, peralatan, tenaga pelatih, peserta dan dana, dari kebutuhan yang diperlukan apakah sudah terpenuhi semua yang ada dilembaga, kalau ada yang belum terpenuhi itulah kebutuhan yang harus dipenuhi untuk pelaksanaan program.

- b. Merumuskan aspek yang diperlu dimitrakan
Dari hasil kegiatan identifikasi langkah selanjutnya menyusun prioritas kebutuhan berdasarkan data hasil identifikasi, sehingga dari hasil kegiatan ini akan diketahui komponen-komponen mana yang akan dimitrakan terlebih dahulu berdasarkan tahapan kegiatan pelaksanaan program dan juga menyusun kriteria-kriteria hasil identifikasi lembaga dibuat aspek-aspek yang akan dibutuhkan untuk penyelenggaraan program, kebutuhan tersebut akan menjadi aspek yang akan dimitrakan dengan lembaga lain dan juga menentukan kriteria calon mitra.
- c. Setelah diketahui komponen-komponen yang akan dimitrakan langkah selanjutnya mencari lembaga calon mitra yang sesuai dengan kebutuhan dan kriteria yang telah ditentukan.
- d. Membuat kesepakatan dengan lembaga calon mitra.
- e. Setelah ada calon yang ditentukan berdasarkan kriteria yang dibutuhkan langkah selanjutnya membuat kesepakatan-kesepakatan berkenaan dengan hak dan kewajiban mitra kerja, keputusan tersebut berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Selanjutnya membuat peraturan-peraturan yang disepakati bersama, yang akan menjadi pedoman kedua belah pihak dalam rangka melaksanakan jaringan kemitraan.

4. Model-model Kemitraan

Model-model kemitraan ini dipahami dari dunia organisme baik yang bersel satu maupun yang tidak kasat mata, maupun hewan yang dapat dilihat. Menurut Sulistiyani (2004: 130-131) kemitraan dibagi menjadi tiga yaitu:

- a. *Pseudo partnership*, atau kemitraan semu.
Kemitraan semu merupakan sebuah persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama seimbang satu dengan lainnya. Bahkan pada suatu pihak belum tentu memahami secara benar akan makna sebuah persekutuan yang dilakukan, dan untuk tujuan apa itu semua dilakukan serta disepakati. Ada suatu yang unik dalam kemitraan semacam ini, bahwa kedua belah pihak atau lebih sama-sama merasa penting untuk melakukan kerjasama, akan tetapi pihak-pihak yang bermitra belum tentu memahami substansi yang diperjuangkan dan manfaatnya apa.
- b. *Mutualism partnership*, atau kemitraan mutualistik.
Kemitraan mutualistik adalah merupakan persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan,

yaitu untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga akan dapat mencapai tujuan secara lebih optimal. Berangkat dari pemahaman akan nilai pentingnya melakukan kemitraan, dua agen/organisasi atau lebih yang memiliki status sama atau berbeda, melakukan kerjasama. Manfaat saling silang antara pihak-pihak yang bekerja sama dapat diperoleh, sehingga memudahkan masing-masing dalam mewujudkan visi dan misinya, dan sekaligus saling menunjang satu dengan lain.

- c. *Conjugation partnership*, atau kemitraan melalui peleburan dan pengembangan.

Kemitraan konjugasi memberikan pemahaman bahwa organisasi, agen-agen, kelompok-kelompok atau perseorangan yang memiliki kelemahan didalam melakukan usaha atau mencapai tujuan organisasi dapat melakukan kemitraan dengan model ini. Dua pihak atau lebih dapat melakukan konjugasi dalam rangka meningkatkan kemampuan masing-masing.

Ada pula model kemitraan yang dikembangkan berdasarkan azas kehidupan organisasi pada umumnya yang berdasarkan pengamatan atas fenomena-fenomena hubungan kerjasama antar organisasi mencakup:

- a. *Subordinate union of partnership*

Kemitraan atas dasar penggabungan dua pihak atau lebih yang berhubungan secara subordinatif atau kemudian disebut *subordinate union of partnership*. Kemitraan semacam ini terjadi antara dua pihak atau lebih yang memiliki status, kemampuan atau kekuatan yang tidak seimbang satu sama lain. Dengan demikian hubungan yang tercipta tidak berada dalam suatu garis lurus yang seimbang satu dengan lainnya, melainkan berada pada hubungan atas bawah, kuat-lemah. Oleh karena kondisi demikian ini mengakibatkan tidak ada *sharing* dan peran atau fungsi yang seimbang.

- b. *Linear union of partnership*

Kemitraan dengan melalui penggabungan pihak-pihak secara linear atau garis lurus, selanjutnya disebut dengan *linear union of partnership*. Dengan demikian pihak-pihak yang bergabung untuk melakukan kerjasama adalah organisasi atau para pihak yang memiliki persamaan secara relatif. Kesamaan tersebut dapat berupa tujuan, atau misi, besaran/volume usaha atau organisasi status atau legalitas.

- c. *Linear collaborative of partnership*

Kemitraan dengan melalui kerjasama secara linear selanjutnya disebut dengan *linear collaborative of partnership*. Dalam konteks kemitraan ini tidak membedakan besaran atau volume, status/legalitas, atau kekuatan para pihak yang bermitra. Yang menjadi tekanan utama adalah visi-misi yang saling mengisi satu dengan lainnya. Dalam hubungan kemitraan ini

terjalin secara linear, yaitu berada pada garis lurus, tidak saling ter subordinasi (Sulistiyani, 2004: 131-132).

5. Kemitraan dalam Pengembangan Pariwisata

Kemitraan dalam pembangunan pada dasarnya mengandung hakekat keadilan dalam perolehan keuntungan dan manfaat, pembebanan biaya dan penanggungans resiko yang timbul dalam kegiatan usaha tersebut. Karena ini adalah kemitraan dalam pembangunan maka tujuan yang ingin dicapai adalah kesejahteraan dari masyarakat. Kemitraan yang dikembangkan adalah kemitraan yang setara antara para pelaku sesuai dengan kemampuan kontribusinya. Kemitraan yang setara memerlukan pula pemahaman yang kuat terhadap hak dan tanggung jawab serta peranan dari masing-masing pelaku (Kartasasmita, 1996: 2). Pelaku kemitraan dapat berasal dari pihak pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Dalam kemitraan peran semua sektor sangat penting, tetapi peran dari pemerintah tetap sangat diperlukan. Peran pemerintah dalam kemitraan adalah:

- a. Mengembangkan kebijaksanaan dan strategi pembangunan yang jelas, yang tercermin baik pada tujuan, arahan maupun indikator-indikator kebijaksanaan (*policy indicators*).
- b. Menetapkan prioritas pembangunan yang realistis dan diikuti oleh semua pihak, baik pemerintah maupun dunia usaha dan masyarakat. Untuk itu perlu kesepakatan diantara berbagai pelaku pembangunan ini, dan karena itu perlu ada dialog-dialog.
- c. Memantapkan mekanisme komunikasi yang lancar dan transparan. Transparansi erat kaitannya dengan tingkat partisipasi dan oleh karena itu, sejak pada tahap awal mekanisme kemitraan yang transparan harus dikembangkan dan dimantapkan.
- d. Mengembangkan pilihan-pilihan atas pola-pola kemitraan yang dapat mencakup kepentingan-kepentingan yang ada diberbagai lapisan dan golongan masyarakat, sehingga masyarakat dapat berperan serta seluas-luasnya dalam kemitraan pembangunan.

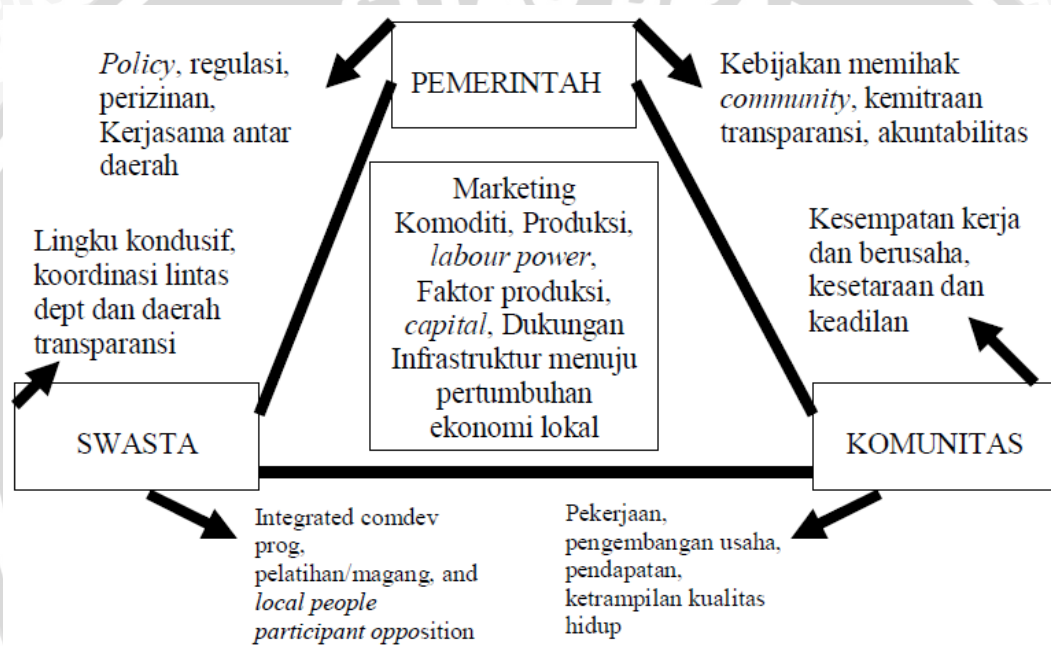
- e. Menyiapkan rencana pengembangan kemitraan yang mencakup rencana investasi pemerintah, swasta, dan masyarakat sebagai bagian dari pembangunan nasional.
- f. Menyiapkan kerangka peraturan dan arahan serta pedoman yang dapat menjadi acuan terutama bagi swasta dan masyarakat dan juga menjamin kepastian usaha (Kartasasmita, 1996: 2).

Kemitraan merupakan langkah yang harus dilaksanakan karena tidak ada pihak yang sangat berkuasa dan memiliki segalanya. Seperti yang diungkap oleh Rohmad (2009: 3):

Pemerintah dengan segala keterbatasannya tidak dapat melakukan sendiri dalam pengembangan industri pariwisata karena keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki pemerintah baik itu dalam bidang kapital atau modal, sumber daya manusia (SDM) ataupun bidang manajemennya. Dengan demikian pemerintah harus melakukan kerja sama atau bermitra dengan aktor lain yaitu sektor *privat* (swasta) maupun masyarakat. Masyarakat akan menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dalam pengembangan kepariwisataan, serta dapat menumbuhkan sikap memiliki dan rasa tanggung jawab sebagai pelaku dan penentu pengembangan kepariwisataan utamanya dalam skala lokal begitupun dengan sektor privat (swasta). Kebutuhan kemitraan dengan melibatkan negara, swasta dan lembaga sosial kemasyarakatan baik ditingkat lokal dan internasional menjadi kebutuhan yang *urgen* bagi pemerintah. Dalam posisi seperti ini, kebijakan negara sangat bermakna, tidak saja sebagai fungsi regulatif dalam negeri tetapi juga fungsi strategis dalam hubungan internasional. Dengan demikian, maka kebijakan pengembangan pariwisata di satu negara tidak dapat dianalisis tanpa mengkaitkan dengan kepentingan kemitraan antar pemerintah, bisnis dan masyarakat. Kebijakan kelembagaan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta, merupakan satu sistem yang saling berinteraksi dengan batasan-batasan dan aturan-aturan yang telah disepakati antar berbagai pihak yang bermitra. Dan kemitraan ini dikembangkan dalam kerangka kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki oleh pihak yang bermitra ini.

Pengembangan pariwisata memerlukan peranan dari semua pihak. Hubungan kemitraan dalam pengembangan pariwisata dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan 1. Pola Kelembagaan Kemitraan antara Pemerintah, Masyarakat dan Swasta



Sumber : Syahrir (Modul Materi Bintek Kemitraan Otonomi Daerah, Depdagri dan JICA, 2004) dalam Rohmad (2009:3).

Berdasar pola kelembagaan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta, Syahrir dalam Rohmad (2009: 3) menunjukkan bahwa kemitraan tersebut terjalin karena masing-masing pihak akan mendapatkan keuntungan. Demikian juga, secara keseluruhan relasi ketiga pihak akan memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi daerah. Dalam kotak di tengah relasi ketiga pihak, Syahrir menunjukkan adanya manfaat bagi pertumbuhan ekonomi lokal yang dihasilkan dari kemitraan pemerintah, swasta, dan komunitas (masyarakat). Dalam hubungan

kemitraan tersebut, masing-masing pihak memiliki peran dan manfaat sendiri-sendiri:

- a. Dalam hubungan kemitraan pemerintah dan swasta maka pemerintah berperan menyusun kebijakan dan aturan main serta menyediakan pelayanan perizinan, dan pengembangan kerjasama antara daerah dimana memungkinkan pelaku bisnis di daerah masing-masing bisa saling mengembangkan investasi. Sedangkan dari pihak swasta, kemitraan akan mendorong peran swasta untuk memberikan lingkungan kondusif daerah sebagai daerah tujuan investasi, melibatkan departemen terkait (industri, tenaga kerja, dan sebagainya), serta kebutuhan untuk transparansi dalam hubungan perizinan dan nilai tambah yang dapat diperoleh dari kegiatan ekonomi lokal.
- b. Dalam hubungan kemitraan pemerintah dan komunitas (masyarakat) maka pemerintah berperan menyusun kebijakan yang memihak kepada kepentingan masyarakat, serta melakukan transparansi dan akuntabilitas publik. Sedangkan bagi masyarakat sendiri kemitraan menjadi peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan kesempatan usaha, dan memperoleh ruang untuk melakukan negosiasi kepada pemerintah dalam memperoleh keadilan dan kesetaraan (Rohmad, 2009: 4-5).

6. Strategi Kemitraan Pengembangan Pariwisata

Kemitraan dalam pengembangan pariwisata memerlukan perencanaan yang matang antara seluruh pihak agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Jika perencanaan tidak dilaksanakan dengan matang dikhawatirkan akan memberikan dampak negatif yang tentu saja tidak diinginkan oleh seluruh pihak. Selain itu perlunya strategi-strategi seperti yang diungkapkan Hafsa (2000: 169-170):

Upaya untuk memacu dan mengembangkan kemitraan yang tangguh dan modern sebagai antisipasi era persaingan bebas diperlukan strategi unggulan. Konsep operasional dari strategi selayaknya dapat dilakukan secara simultan oleh semua pelaku kemitraan termasuk lembaga pemerintah sebagai pembina. Terdapat beberapa strategi yang perlu dilaksanakan agar kebijaksanaan dalam kemitraan dapat diwujudkan.

Strategi kemitraan yang perlu dilaksanakan agar kebijaksanaan dalam kemitraan dapat diwujudkan. Hafsa (2000: 170-179) menjabarkan strategi-

strategi yang perlu dilakukan agar kemitraan usaha dapat terwujud dan poin-poinnya sebagai berikut:

- a. Membangun Usaha Kecil dan Koperasi yang Mandiri dan Kuat.
- b. Memacu Penerapan Undang-undang tentang Usaha Kecil dan Peraturan Pemerintah tentang Kemitraan.
- c. Memantapkan Kelembagaan kemitraan.
- d. Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia.
- e. Menerapkan teknologi, standarisasi dan akreditasi.
- f. Membangun akses pasar dan informasi pasar.
- g. Mendorong pengembangan investasi dan permodalan.
- h. Memantapkan birokrasi pemerintah dengan lembaga pelayanan.

Berdasarkan strategi kemitraan usaha menurut Hafsa (2000: 170-179), penulis menjabarkan strategi kemitraan pengembangan pariwisata tersebut antara lain:

- a. Meningkatkan Kemampuan Sumberdaya Manusia
Peningkatan kapasitas SDM dengan memberikan pendidikan dan pelatihan oleh pihak-pihak yang ahli dan berpengalaman dibidang pengembangan kemitraan pariwisata. Kegiatan utama peningkatan kemampuan SDM ini mengarah kepada pelatihan pengelolaan desa wisata, pendampingan, serta mengikuti workshop/lokakarya.
- b. Memacu Penerapan Peraturan tentang Pariwisata dan Kemitraan.
 - 1) Sosialisasi peraturan tentang pariwisata dan kemitraan melalui seminar, workshop, diskusi, media massa dan elektronika untuk meningkatkan pengertian dan pemahaman bagi aparat pemerintah, masyarakat terkait dan juga swasta.

- 2) Menyiapkan perangkat operasional, berupa Keputusan Menteri, Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk teknis sebagai acuan penerapan dilapangan.
- 3) Menyiapkan sumberdaya manusia melalui pelatihan mulai dari tingkat pusat sampai daerah sebagai petugas yang memiliki kemampuan untuk memberikan informasi dan penjelasan tentang peraturan tentang pariwisata dan kemitraan.
- 4) Memonitor dan mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan peraturan tentang pariwisata dan kemitraan tersebut serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan.

c. Memantapkan Kelembagaan Kemitraan

Bertujuan untuk mengembangkan kelembagaan ekonomi, mengembangkan jaringan kemitraan usaha dan memfasilitasi terhadap akses pemasaran desa wisata. Persyaratan yang dibutuhkan diantara pihak bermitra untuk mewujudkan strategi antara lain:

- 1) Pengembangan pola-pola kemitraan beraskan saling membutuhkan, saling menguntungkan dan saling membenarkan dalam bentuk sederhana, luwes sehingga mudah diimplementasikan.
- 2) Menyiapkan pedoman pembinaan kemitraan pariwisata yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi aparat pembina dan pelaku kemitraan.

d. Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Sumberdaya

Pengembangan pariwisata tentu bertumpu pada potensi dari sumberdaya lokal. Sumberdaya lokal digunakan dengan efisien dan berkelanjutan diawali dengan identifikasi potensi dan sumberdaya lokal yang tersedia, serta identifikasi kebijakan maupun teknologi yang sesuai dengan upaya pemanfaatan sumberdaya yang ada. Setelah itu dilakukan langkah-langkah strategis untuk introduksi teknologi tepat guna untuk pendampingan usaha.

- e. Memantapkan Birokrasi Pemerintah sebagai Lembaga Pelayanan
 - 1) Meningkatkan kualitas aparatur pemerintahan menjadi profesional sesuai dengan fungsi dan tugasnya sehingga menjadi aparat yang andal, efisien dan berwibawa.
 - 2) Menciptakan lembaga pemerintahan yang ramping dan efisien sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat melayani dengan efektif masyarakat terutama dunia usaha.
 - 3) Mengubah mental sebagai aparat yang mempunyai kebiasaan dilayani menjadi pelayan yang prima.

Dalam kemitraan pengembangan pariwisata tujuan akhir yang ingin didapat adalah selain menciptakan tempat wisata baru juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekitar dan peningkatan pendapatan daerah maupun nasional. Manfaat yang dapat diperoleh masyarakat selain dari sisi ekonomi juga peningkatan ketrampilan serta pendidikan untuk menciptakan hal-hal baru yang bermanfaat.

Dalam pengembangan pariwisata desa wisata yang menjadi pengelola utama

adalah masyarakat. Apabila potensi wisata dan terdapat kesiapan masyarakat strategi yang dapat digunakan mengembangkan desa wisata adalah:

a. Merancang berbagai produk wisata

Produk wisata misalnya beragam paket program dan produk wisata seperti program *trekking* menyusuri keindahan alam yang masih alami, betang sawah dan kebun buah, serta beberapa kerajinan dan budaya yang langsung dapat diikuti pengunjung seperti berlatih membuat barang kerajinan bersama pengrajin.

b. Meningkatkan kemampuan, ketrampilan dan kompetensi masyarakat.

Salah satu ahli dibidang pariwisata Gunn dalam Sulistiani (2011: 9) mengatakan perencanaan pengembangan pariwisata ditentukan oleh keseimbangan potensi sumber daya dan jasa (*supply*) dan permintaan wisatawan (*demand*). Usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan SDM bisa dilakukan dengan pelatihan masyarakat setempat untuk dikaryakan sebagai *guide*, penunjuk jalan, pengelola pondok wisata, penyedia konsumsi bagi wisatawan, serta pelatihan penduduk untuk memproduksi kerajinan tangan (Sulistiani, 2011: 8-9).

E. Pariwisata

1. Pengertian Pariwisata

McIntosh dalam Pendit (2002: 34) mengungkapkan “Pariwisata adalah gabungan gejala dan hubungan yang timbul dari interaksi wisatawan, bisnis, pemerintah tuan rumah serta masyarakat tuan rumah dalam proses menarik dan melayani wisatawan-wisatawan serta para pengunjung lainnya. Sedangkan

pengertian pariwisata menurut WTO dalam Pitana (2009:45): *“The activities of persons traveling to and staying in places outside their usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business and other purposes”*

(Aktivitas dari orang-orang untuk bepergian dan tinggal di tempat diluar lingkungan mereka biasanya tidak lebih daripada beberapa bulan secara berurutan dalam satu tahun yang berulang-ulang, bisnis dan tujuan lainnya)

Jika mengikuti pengertian yang terdapat dalam Undang-undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan pariwisata sebagai berikut:

- a. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
- b. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
- c. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
- d. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

2. Pengembangan Pariwisata

Kepariwisataan adalah kegiatan yang multi aktor dimana didalam kegiatan kepariwisataan terdapat banyak usaha dan kepentingan yang berkumpul menjadi pariwisata. Pengertian pengembangan sendiri menurut Ndraha (1993: 184) berasal dari kata kembang, berarti meningkatkan atau menambah sesuatu yang sudah ada, baik kualitatif maupun kuantitatif, jadi ada sesuatu yang bertambah. Pertambahan itu sendiri adalah pembangunan.

Pengembangan pariwisata adalah segala kegiatan dan usaha yang terkoordinasi untuk menarik wisatawan, menyediakan semua sarana dan prasarana, barang dan jasa fasilitas yang diperlukan, guna melayani kebutuhan wisatawan (Munasef, 1995: 1). Berdasar pengertian-pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengembangan pariwisata adalah kegiatan dan usaha yang terkoordinasi serta terencana untuk membuat pariwisata yang sudah ada menjadi lebih baik dari sisi ekonomi, sosial, dan kultural dengan tujuan dapat menarik wisatawan dengan menyediakan sarana prasarana serta jasa fasilitas yang diperlukan wisatawan.

Pembangunan industri pariwisata pada intinya berupa aktivitas menggali segala potensi pariwisata, baik yang berasal dari sumber daya alam (*natural resources*), sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber buatan manusia (*man made resources*). Secara teoritis menurut Usman (2004: 55-57), interaksi antar instansi ditingkat lokal dalam kaitannya dengan perencanaan dan implementasi program-program pengembangan industri pariwisata dapat digambarkan dalam dua macam struktur, yaitu:

a. Rangkaian antarorganisasi (*inter-organizational set*)

Dalam struktur interaksi rangkaian antarorganisasi yang ditekankan adalah menggambarkan kedudukan instansi tertentu dalam kegiatan pengembangan industri pariwisata dan mengidentifikasi atau menjabarkan interaksi-interaksi *dyadic* yang dilakukan oleh instansi tersebut dengan instansi-instansi lain. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam membaca struktur interaksi tersebut. Pertama, setiap instansi dengan instansi lain, dapat mempengaruhi bentuk interaksi *inter-organizational set*. Kedua, sejumlah instansi yang sama dapat membangun *inter-organizational set* yang berbeda-beda tergantung pada program pengembangan industri pariwisata yang ditangani. Struktur interaksi dalam menangani masalah sumber daya alam (*natural resources*) boleh jadi berbeda dengan penanganan sumber daya manusia (*human resources*); dan penanganan terhadap keduanya mungkin sekali juga

berbeda dengan penanganan masalah sumber buatan manusia (*man made resources*).

b. Jaringan antarorganisasi (*inter-organizational network*)

Dalam jaringan antarorganisasi lebih kompleks daripada struktur interaksi yang pertama. Dalam struktur interaksi yang kedua ini, kedudukan semua instansi yang menjadi bagian dari jaringan dan hubungan *dyadic* ikut diperhitungkan. Struktur interaksi ini juga mengabaikan apa yang disebut *a focal organization*, sebab yang dipentingkan adalah kedudukan semua instansi yang menjadi bagian dari jaringan.

Suatu tindakan yang dilakukan pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai demikian juga dengan pengembangan kepariwisataan. Sesuai dengan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 1969 pada pasal yang kedua ditunjukkan bahwa tujuan pengembangan kepariwisataan adalah:

- a. Meningkatkan pendapatan devisa pada khususnya dan pendapatan negara dan masyarakat pada umumnya, perluasan kesempatan serta lapangan kerja dan mendorong kegiatan-kegiatan industri-industri penunjang dan industri-industri sampingan lainnya.
- b. Memperkenalkan dan mendayagunakan keindahan alam dan kebudayaan Indonesia.
- c. Meningkatkan persaudaraan/persahabatan nasional dan internasional (Yoeti, 1997: 35)

Pengembangan pariwisata diperlukan perencanaan terlebih dahulu sebagai dasar dalam pelaksanaannya. Perencanaan pengembangan pariwisata menurut Hadinoto (1996: 100-101) meliputi lima maksud dasar, yaitu:

- a. Identifikasi pendekatan alternatif dari pemasaran, pengembangan, organisasi industri wisata, pelayanan pendukung, dan aktivitas.
- b. Penyesuaian terhadap yang tak terduga yaitu mengenai kondisi ekonomi umum, situasi *supply/demand* energi, nilai-nilai, dan pola hidup, keuntungan besar industri tersebut.
- c. Mempertahankan keunikan, yaitu: ciri khas alam dan sumber daya, kebudayaan lokal dan kehidupan tradisional, arsitektur lokal, monument sejarah, peristiwa dan aktivitas lokal, taman dan kawasan olahraga di luar gedung, dan ciri khas destinasi yang lain.
- d. Mengkreasikan keinginan seperti: meningkatkan kesadaran akan keuntungan wisata, menciptakan citra yang jelas dan positif dari kawasan destinasi, organisasi industri pariwisata yang efektif, meningkatkan

kerjasama dengan para operator individual, program efektif pemasaran, isyarat dan informasi wisata, serta maksud-maksud lain.

- e. Mencegah yang tidak diinginkan, seperti: pertentangan dan persaingan antar para operator, sikap permusuhan yang tidak ramah dari penduduk lokal terhadap pengunjung, kerusakan atau perubahan permanen yang tidak diinginkan dari ciri khas alam dan sumberdaya sejarah, kehilangan identitas budaya, pemberhentian peristiwa dan aktivitas lokal, kepadatan, kongesti dan masalah lalu lintas, polusi udara, visual, kemusiman tinggi dan faktor-faktor lain.

3. Pengelolaan Pariwisata

Pariwisata baik yang bersifat alam maupun buatan harus perlu dilakukan perawatan agar tidak terjadi kerusakan yang fatal. Oleh karena itulah pariwisata perlu dilakukan pengelolaan untuk menjaga kelestariannya. Menurut Cox (1985) dalam Pitana (2009: 81-82) pengelolaan pariwisata harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

- a. Pembangunan dan pengembangan pariwisata haruslah didasarkan pada kearifan lokal dan *special local sense* yang merefleksikan keunikan peninggalan budaya dan keunikan lingkungan.
- b. Preservasi, proteksi, dan peningkatan kualitas sumber daya yang menjadi basis pengembangan kawasan pariwisata.
- c. Pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengakar pada khasanah budaya lokal.
- d. Pelayanan kepada wisatawan yang berbasis keunikan budaya dan lingkungan lokal.
- e. Memberikan dukungan dan legitimasi dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata jika terbukti memberikan manfaat positif, tetapi sebaliknya mengendalikan dan/atau menghentikan aktivitas pariwisata tersebut jika melampaui ambang batas (*carrying capacity*) lingkungan alam atau akseptabilitas sosial walaupun disisi lain mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pengelolaan pariwisata juga dapat berperan strategis untuk beberapa fungsi, sebagai berikut:

- a. Perlindungan terhadap sumber daya alam dan lingkungan
Umumnya pengembangan kawasan wisata akan diikuti oleh degradasi sumber daya yang diakibatkan oleh pertumbuhan dan pengembangan

industri pariwisata yang ekstensif dan tidak terkendali, serta cepatnya pertumbuhan penduduk di kawasan tersebut sebagai konsekuensi logis dari kesempatan berusaha yang ditimbulkan. Pariwisata, jika dikelola dengan baik, mampu menyediakan solusi ekonomi untuk proteksi sumber daya alam dan lingkungan.

b. Keberlanjutan ekonomi

Kecenderungan industrialisasi dan perkembangan ekonomi global akan mengarah kepada kesalingtergantungan pada produk impor yang menguras devisa negara. Pengembangan pariwisata menjadi salah satu solusi masalah tersebut dengan menyediakan 'produk ekspor yang tidak lari kemana-mana' sebagai sumber devisa. Pengembangan pariwisata juga menyediakan keuntungan ekonomi bagi lapisan masyarakat bawah yang umumnya berada di kawasan pedesaan sehingga diharapkan mampu menciptakan pendistribusian pendapatan dan sumber daya ekonomi yang menjadi lebih baik.

c. Peningkatan integritas budaya

Aspek ekologi dalam pariwisata menyiratkan sebuah hubungan timbal balik antara wisatawan dan komunitas lokal yang melibatkan dialog budaya yang berdasarkan penghormatan terhadap eksistensi dan integritas masing-masing. Jika elemen integritas budaya ini hilang maka dapat dipastikan sebaik apapun kawasan wisata yang dibangun maka lambat laun akan ditinggalkan.

d. Nilai pendidikan dan pembelajaran

Keberlanjutan dan kelestarian sebuah kawasan wisata tergantung kepada bagaimana membangkitkan pemahaman dan kepedulian semua pemangku kepentingan terhadap pentingnya kontribusi, eksistensi, dan perlindungan terhadap sumber daya pendukung pariwisata. Pemahaman dan kepedulian ini hanya bisa dicapai melalui proses penanaman tata nilai (*value*) dan norma (*norm*) melalui proses pendidikan dan pembelajaran (Liu dan Western dalam Pitana, 2009: 84-85).

4. Peranan Pemerintah dalam Pariwisata

Pariwisata adalah kegiatan industri yang didalamnya terdapat berbagai industri yang bergantung pada kegiatan pariwisata. Karena pariwisata adalah industri yang identik dengan faktor ekonomi, maka kerusakan pariwisata dapat menyebabkan kekacauan ekonomi masyarakat dan juga negara. Oleh karena itu dalam pariwisata peranan dari pemerintah sangat penting. Secara umum peranan pemerintah dalam pariwisata adalah perencanaan daerah kawasan pariwisata,

pembangunan fasilitas pendukung pariwisata, kebijakan pariwisata, serta peraturan pariwisata.

Prajogo dalam Spillane (1989: 134-135) menyatakan bahwa negara yang sadar akan pengembangan pariwisata tertentu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Perencanaan pengembangan pariwisata harus menyeluruh, sehingga seluruh segi pengembangan pariwisata diperhitungkan dengan pembangunan sektor lain.
- b. Pengembangan pariwisata harus diintegrasikan ke dalam pola dan program pembangunan semesta ekonomi, fisik dan sosial sesuatu negara. Karena pengembangan pariwisata berkaitan dengan sektor lain dan dapat mempengaruhi pembangunan sektor lain.
- c. Pengembangan pariwisata harus diarahkan sedemikian rupa, sehingga dapat membawa kesejahteraan ekonomi yang tersebar luas dalam masyarakat.
- d. Pengembangan pariwisata harus “sadar lingkungan”, sehingga pengembangannya mencerminkan ciri-ciri khas budaya dan lingkungan alam suatu negara, bukannya justru merusak lingkungan alam dan budaya yang khas itu. Pertimbangan utama harus mendayagunakan pariwisata sebagai sarana untuk memelihara kekayaan budaya, lingkungan alam dan peninggalan sejarah, sehingga masyarakat sendiri menikmati dan merasa bangga akan kekayaannya itu.
- e. Pengembangan pariwisata harus diarahkan sedemikian rupa, sehingga pertentangan sosial dapat dicegah seminimal mungkin. Sedapat mungkin dapat menampakkan perubahan-perubahan sosial yang positif.
- f. Penentuan tata cara pelaksanaannya harus disusun sejelas-jelasnya berdasar pertimbangan-pertimbangan yang masak sesuai kemampuan.
- g. Pencatatan (monitoring) secara terus-menerus mengenai pengaruh pariwisata terhadap sesuatu masyarakat dan lingkungan, akan merupakan bahan yang baik untuk meluruskan kembali akibat perkembangan pariwisata yang merugikan, sehingga merupakan sarana pengendalian pengembangan yang terarah.

Dari sudut lain apabila pengembangan ditinjau dari sudut pelaksanaannya yang bersifat teknis operasional, maka yang harus diperhatikan ialah:

- a. Pembinaan produk wisata
Pembinaan produk wisata merupakan usaha terus-menerus untuk meningkatkan mutu maupun pelayanan dari berbagai unsur produk wisata itu, misalnya jasa penginapan, jasa angkutan wisata, jasa hiburan,

makanan, jasa tur dan sebagainya. Pembinaan tersebut dapat berupa berbagai kombinasi usaha-usaha seperti pendidikan dan latihan, pengaturan/pengarahan pemerintah, pemberian rangsangan, ataupun terciptanya kondisi iklim persaingan sehat yang mendorong peningkatan mutu produk dan pelayanan.

b. Pemasaran

Banyak batasan mengenai pemasaran. Secara umum disini dapat dibatasi sebagai seluruh kegiatan untuk mempertemukan permintaan dan penawaran, sehingga pembeli mendapat kepuasan dan penjual mendapat keuntungan maksimal dengan risiko sekecil-kecilnya. Usaha-usaha pemasaran perlu untuk menarik pembeli mengingat dalam dunia pariwisata persaingan sudah terlalu tajam (Spillane, 1989: 135).

F. Desa Wisata

1. Pengertian Desa Wisata

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan fokus pembangunan di daerah pedesaan, sehingga dengan demikian akan terjadi perubahan sosial kemasyarakatan dari urbanisasi ke ruralisasi (orang-orang kota senang/akan pergi ke desa untuk berekreasi). Departemen Pariwisata telah membuat program yang disebut pola PIR (Pariwisata Inti Rakyat), dengan mengembangkan pembangunan desa wisata. Adapun pengertian dari desa wisata adalah:

Menurut Pariwisata Inti Rakyat (PIR), yang dimaksud dengan Desa Wisata adalah : Suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya : atraksi, akomodasi, makanan-minuman, dan kebutuhan wisata lainnya (Priasukmana, 2001: 38).

Desa harus dihidupkan karena disanalah rakyat berdiam dan tinggal bersama keluarganya. Akhir-akhir ini urbanisasi sedang marak terjadi, pemuda desa banyak yang berspekulasi mencari nafkah di kota-kota besar. Tetapi malah menjadi pengangguran karena tidak tersedianya kesempatan kerja. Salah satu

upaya untuk mengatasi urbanisasi adalah dengan membangun desa untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi pemuda-pemuda desa. Diwaktu yang akan datang, kecenderungan wisatawan global lebih banyak akan berkunjung ke desa-desa terpencil untuk melihat sesuatu yang belum pernah dilihat di negaranya sendiri. Di kota yang akan dilihatnya, hotel dan restoran lebih bagus di negaranya sendiri (Yoeti, 2000: 142).

Dalam rangka membangun ekonomi desa berdasarkan kerakyatan, membangun desa wisata sangat relevan. Dengan dibangunnya desa-desa wisata disemua Daerah Tujuan Wisata (DTW) seluruh Indonesia, diharapkan akan terjadi pemerataan ekonomi, kesempatan berusaha, dan kerja. Kiranya tidak berlebihan dengan membangun desa wisata sekaligus akan dapat memberdayakan pembangunan masyarakat dalam bentuk:

- a. Mengembangkan usaha-usaha berskala kecil dan menengah yang hasilnya dapat memenuhi kebutuhan orang banyak umumnya; dan wisatawan yang berkunjung ke desa tersebut khususnya.
- b. Mengembangkan usaha kerajinan dan menciptakan cendera mata yang memiliki ciri khas kedaerahan berbeda dengan desa lain.
- c. Mengembangkan dan mengelola agrowisata untuk tanam-tanaman yang khas yang terdapat di desa yang bersangkutan.
- d. Mengembangkan dan membina ekowisata dengan melibatkan rakyat banyak yang terdapat di sekitar proyek.
- e. Mengkoordinasikan kesenian tradisional yang ada untuk disuguhkan sebagai atraksi wisata bila wisatawan berkunjung ke daerah tersebut (Yoeti, 2000: 143).

2. Persyaratan Desa Wisata

Merujuk kepada definisi desa wisata, desa-desa yang bisa dikembangkan dalam program desa wisata akan memberikan contoh yang baik bagi desa lainnya, penetapan suatu desa dijadikan sebagai desa wisata harus memenuhi persyaratan-persyaratan, antara lain sebagai berikut :

- a. Aksesibilitasnya baik, sehingga mudah dikunjungi wisatawan dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi.
- b. Memiliki obyek-obyek menarik berupa alam, seni budaya, legenda, makanan lokal, dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai obyek wisata.
- c. Masyarakat dan aparat desanya menerima dan memberikan dukungan yang tinggi terhadap desa wisata serta para wisatawan yang datang ke desanya.
- d. Keamanan di desa tersebut terjamin.
- e. Tersedia akomodasi, telekomunikasi, dan tenaga kerja yang memadai.
- f. Beriklim sejuk atau dingin.
- g. Berhubungan dengan obyek wisata lain yang sudah dikenal oleh masyarakat luas (Priasukmana, 2001: 38).

3. Tujuan Pembangunan Desa Wisata

Pembangunan dilaksanakan pasti ada tujuan yang ingin dicapai, demikian juga dengan pembangunan desa wisata. Secara garis besar tujuan dari pembangunan desa wisata adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan jalan membuka lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan daya saing masyarakat dengan perekonomian swasta yang semakin mendominasi perekonomian. Lebih rinci lagi tujuan pembangunan desa wisata adalah sebagai berikut:

- a. Mendukung program pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan dengan menyediakan obyek wisata alternatif.
- b. Menggali potensi desa untuk pembangunan masyarakat sekitar desa wisata.
- c. Memperluas lapangan kerja dan lapangan berusaha bagi penduduk desa, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Dengan demikian akan terjadi pemerataan pembangunan ekonomi di desa.
- d. Mendorong orang-orang kota yang secara ekonomi relatif lebih baik, agar senang pergi ke desa untuk berekreasi (Ruralisasi).
- e. Menimbulkan rasa bangga bagi penduduk desa untuk tetap tinggal di desanya, sehingga mengurangi urbanisasi.
- f. Mempercepat pembauran antara orang-orang non pribumi dengan penduduk pribumi.
- g. Memperkokoh persatuan bangsa, sehingga bisa mengatasi disintegrasi (Priasukmana, 2001: 38-39).

4. Langkah-langkah Kebijakan

Pembangunan desa wisata memerlukan langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Menurut Priasukmana (2001:40-42) untuk suksesnya pembangunan desa wisata, perlu ditempuh upaya-upaya, sebagai berikut :

a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pelaksanaan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), bisa dilakukan melalui pendidikan, pelatihan dan keikutsertaan dalam seminar, diskusi, dan lain sebagainya, serta di bidang-bidang kepariwisataan.

Pendidikan diperlukan untuk tenaga-tenaga yang akan dipekerjakan dalam kegiatan manajerial. Untuk itu, sebaiknya ditugaskan generasi muda dari desa yang bersangkutan untuk dididik pada sekolah-sekolah kepariwisataan, sedangkan pelatihan diberikan kepada mereka yang akan diberi tugas menerima dan melayani wisatawan. Keikutsertaan dalam seminar, diskusi, dan lain sebagainya diberikan kepada para petugas kepariwisataan di desa, kecamatan, dan kabupaten, karena penduduk desa umumnya hanya mempunyai keterampilan bertani.

Kepada mereka dapat diberikan pelatihan keterampilan lain untuk menambah kegiatan usaha seperti kerajinan, industri rumah tangga, pembuatan makanan lokal, budi daya jamur, cacing, menjahit, dan lain sebagainya.

b. Kemitraan

Pola kemitraan atau kerjasama dapat saling menguntungkan antara pihak pengelola desa wisata dengan para pengusaha pariwisata di kota atau pihak Pembina desa wisata dalam hal ini pihak dinas pariwisata daerah. Bidang-bidang usaha yang bisa dikerjasamakan, antara lain seperti : bidang akomodasi, perjalanan, promosi, pelatihan, dan lain-lain.

c. Kegiatan Pemerintahan di Desa

Kegiatan dalam rangka desa wisata yang dilakukan oleh pemerintah desa, antara lain seperti : Rapat-rapat dinas, pameran pembangunan, dan upacara-upacara hari-hari besar diselenggarakan di desa wisata.

d. Promosi

Desa wisata harus sering dipromosikan melalui berbagai media, oleh karena itu desa atau kabupaten harus sering mengundang

wartawan dari media cetak maupun elektronik untuk kegiatan hal tersebut.

e. Festival / Pertandingan

Secara rutin di desa wisata perlu diselenggarakan kegiatan-kegiatan yang bisa menarik wisatawan atau penduduk desa lain untuk mengunjungi desa wisata tersebut, misalnya mengadakan festival kesenian, pertandingan olah raga, dan lain sebagainya.

f. Membina Organisasi Warga

Penduduk desa biasanya banyak yang merantau di tempat lain. Mereka akan pulang ke desa kelahirannya pada saat lebaran Idul Fitri, yang dikenal dengan istilah “mudik”. Mereka juga bisa diorganisir dan dibina untuk memajukan desa wisata mereka. Sebagai contoh di Desa Tambaksari, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis, Propinsi Jawa Barat telah berkembang organisasi kemasyarakatan atau disebut “warga”, yaitu ikatan keluarga dari satu keturunan yang hidup terpecah, mereka tersebut bertujuan ingin mengeratkan kembali tali persaudaraan diantara keturunan mereka. Pada setiap hari raya Idul Fitri mereka berkumpul secara bergiliran saling ketemu sambil mengenalkan anak cucu mereka, kemudian mereka membentuk suatu organisasi. Badan organisasi dinamakan koperasi keluarga, mereka yang sukses membantu keluarga yang kurang mampu. Fenomena kemasyarakatan semacam ini perlu didorong dan dikembangkan untuk memajukan desa wisata.

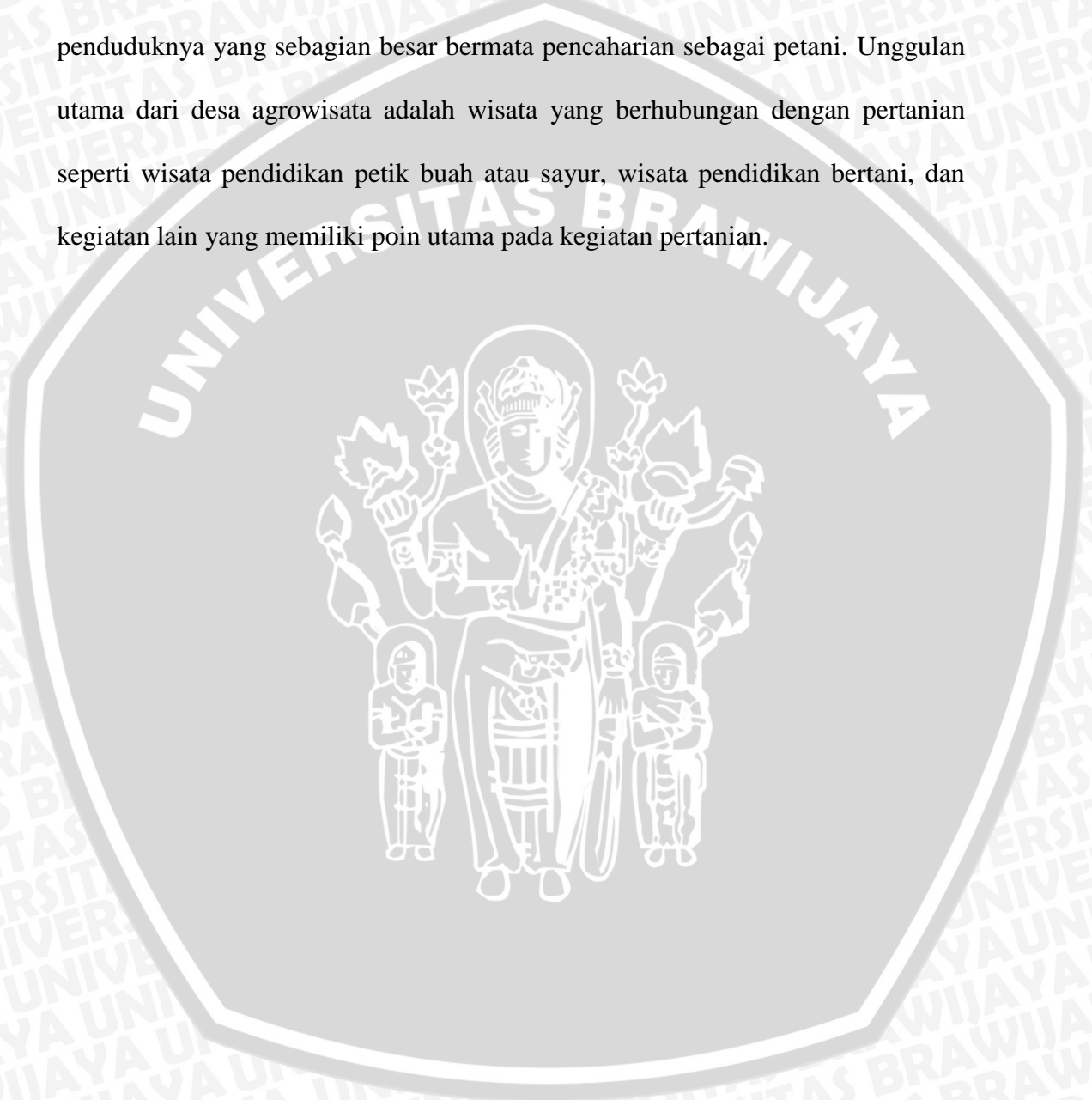
g. Kerjasama dengan Universitas

Universitas-Universitas di Indonesia mensyaratkan melakukan Kuliah Kerja Praktek Lapangan (KKPL) bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya, sehubungan dengan itu sebaiknya dijalin atau diadakan kerjasama antara desa wisata dengan Universitas yang ada, agar bisa memberikan masukan dan peluang bagi kegiatan di desa wisata untuk meningkatkan pembangunan desa wisata tersebut.

5. Desa Agrowisata

Agrowisata merupakan bagian dari objek wisata yang memanfaatkan usaha pertanian (agro) sebagai objek wisata. Tujuannya adalah untuk memperluas pengetahuan, pengalaman, rekreasi, dan hubungan usaha dibidang pertanian. Manfaat yang dapat diperoleh dari agrowisata adalah menonjolkan budaya lokal dalam memanfaatkan lahan, meningkatkan pendapatan petani sambil memelihara sumber daya lahan, serta memelihara budaya maupun teknologi lokal (Direktori Wisata Agro Indonesia)

Pembahasan dalam skripsi ini mengenai desa agrowisata yang merupakan desa wisata dengan hal unggulan pada sektor pertanian agro. Desa agrowisata adalah desa yang menawarkan suasana pedesaan yang mencerminkan kehidupan asli penduduknya yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Unggulan utama dari desa agrowisata adalah wisata yang berhubungan dengan pertanian seperti wisata pendidikan petik buah atau sayur, wisata pendidikan bertani, dan kegiatan lain yang memiliki poin utama pada kegiatan pertanian.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan mengenai sesuatu yang sedang terjadi pada saat penelitian dilakukan. Sedangkan penelitian kualitatif menurut Moleong (2004: 6) menjelaskan bahwa:

“Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.”

Penelitian kualitatif digunakan karena dapat mengungkap peristiwa-peristiwa riil di lapangan dan juga dapat mengungkapkan nilai-nilai tersembunyi (*hidden value*) dari penelitian ini. Pendekatan kualitatif ini seringkali digunakan dalam penelitian sosial disebut juga pendekatan naturalistik (Lincoln dan Guba, 1985 dalam Rohmad, 2009: 11).

B. Fokus Penelitian

Fokus pada dasarnya adalah masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperoleh melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya (Moleong, 2004: 97).

Adapun yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah:

1. Kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan desa agrowisata di Punten.

- a. Peran pemerintah dalam kemitraan mengembangkan desa agrowisata di Punten.
- b. Peran serta masyarakat dalam kemitraan mengembangkan desa agrowisata di Punten.
- c. Kemitraan dalam mengembangkan desa agrowisata di Punten diantaranya dilihat dari persyaratan kemitraan sebagai berikut:
 - 1) Ada dua pihak atau lebih,
 - 2) Memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan,
 - 3) Ada kesepakatan,
 - 4) Saling membutuhkan.

2. Faktor pendukung dan penghambat kemitraan dalam mengembangkan desa agrowisata di Punten.
 - a. Faktor pendukung
 - b. Faktor penghambat

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan, untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan. Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian adalah Kota Batu. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini adalah dengan pertimbangan bahwa Kota Batu adalah salah satu kota yang memiliki perhatian pembangunan pada bidang pariwisata, hal ini dapat dilihat dari visi Kota Batu yaitu “Kota Batu Sentra Pertanian Organik Berbasis Pariwisata Internasional”. Salah satu wisata yang sedang gencar

dikembangkan adalah desa wisata dan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai desa wisata di Kota Batu

Sedangkan situs penelitian adalah tempat peneliti menangkap keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Situs penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu dengan pertimbangan dinas ini memiliki tugas dan fungsi untuk mengembangkan potensi pariwisata di Kota Batu termasuk dalam mengembangkan desa wisata. Selain itu situs penelitian juga pada Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu dengan pertimbangan Desa Punten merupakan pusat dan percontohan desa wisata di Kota Batu. Desa Punten memiliki beberapa wisata seperti wisata petik apel dan jeruk, berkuda, *camping* dan *outbound* area. Beragamnya wahana wisata memerlukan peranan dari banyak SDM terutama masyarakat desa sehingga peneliti berharap bisa memperoleh fakta nyata peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata terutama desa wisata.

D. Sumber Data

Menurut Lofland dalam (Moleong, 2004: 157), sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Oleh karena itu, data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Data Primer

Adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumbernya. Pihak yang akan dijadikan sumber data adalah pemimpin atau pihak-pihak yang terkait pada kemitraan dalam mengembangkan

desa wisata. Adapun pihak yang menjadi sasaran mendapatkan data adalah:

- a. Bapak Muljo Adji, BcKn selaku Kepala Seksi Bimbingan dan Pelatihan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu.
 - b. Bapak Syaiful Rochani, SP selaku Kepala Seksi Obyek & Daya Tarik Pariwisata.
 - c. Bapak Cahyono Hadi, S.Sos selaku Ketua Pokdarwis Desa Punten.
 - d. Bapak Suwito Pamungkas selaku Ketua Pengelola Kampung Wisata Kungkuk.
 - e. Masyarakat dari desa wisata Punten.
 - f. Serta pihak-pihak terkait lainnya.
2. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek kajian yang diteliti namun diusahakan oleh pihak lain dengan cara mengumpulkan arsip dan catatan yang berhubungan dengan pembahasan tentang masalah dan fokus yang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Yang dimaksud dengan langkah ini ialah pelaksanaan pengumpulan data dalam rangka pengukuran dan pengujian hipotes (Surakhmad, 2004:109). Jadi pelaksanaan yang sebenarnya seperti dalam langkah ini adalah kelanjutan dari (dan berdasarkan atas) agenda yang telah disusun. Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan masalah-masalah yang diteliti, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi lapangan, yaitu peneliti langsung terjun pada objek yang

diteliti dengan tujuan memperoleh data dan fakta di lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada peneliti. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi (Mardalis, 2008: 64).

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Observasi sebagai alat pengumpul data dapat dilakukan secara spontan dapat pula dengan daftar isian yang telah disiapkan sebelumnya. Pada dasarnya teknik observasi digunakan untuk melihat atau mengamati perubahan fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang yang kemudian dapat dilakukan penilaian atas perubahan tersebut (Subagyo, 1991: 63).

3. Dokumentasi

Adalah suatu cara yang digunakan untuk mencatat informasi yang riil berupa dokumen, catatan, dan laporan yang tertulis serta relevan dengan tujuan penelitian. Metode ini dipergunakan sebagai pelengkap dari metode wawancara maupun pengamatan dan diharapkan akan dapat lebih melengkapi data yang belum terekam dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan untuk melakukan penelitian, khususnya dalam kegiatan pengumpulan data. Dalam mendukung proses pengumpulan dan pengambilan data yang diinginkan, peneliti menggunakan instrumen peneliti berupa:

1. Peneliti sendiri yang merupakan alat pengumpul data utama. Hal ini dilakukan karena hanya peneliti yang dapat berhubungan dengan responden atau objek lainnya secara langsung.
2. Pedoman wawancara (*interview guide*) yaitu berupa daftar pertanyaan yang diajukan pada informan. Pedoman wawancara ini digunakan oleh peneliti dalam melakukan wawancara untuk pengumpulan data yang diperlukan sesuai dengan topik yang sedang diteliti.
3. Alat bantu lainnya seperti telepon genggam untuk merekam hasil wawancara, buku catatan dan kamera.

G. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas interbal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas) (Sugiyono, 2008: 270-277).

1. Uji Kredibilitas

Dapat dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *membercheck*.

2. Pengujian *Transferability*

Pengujian *transferability* menunjukkan hasil penelitian dapat diterapkan/digunakan dalam situasi lain. Sehingga peneliti dalam membuat laporan penelitian harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya.

3. Pengujian *Depenability*

Dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.

4. Pengujian *Konfirmability*

Uji *konfirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *konfirmability*.

H. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2008:244).

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang

terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif (walaupun tidak menolak data kuantitatif), sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada pola yang jelas (Sugiyono, 2008:243).

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2008: 246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Alasan peneliti menggunakan analisis data kualitatif Miles dan Huberman adalah peneliti merasa mampu dalam melaksanakan tahapan-tahapan penelitian dan tahapan-tahapan yang ada dirasa dapat memperoleh jawaban atas rumusan masalah dari penelitian.

Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drowing/verification* (Sugiyono, 2008: 247-253).

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih data-data yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

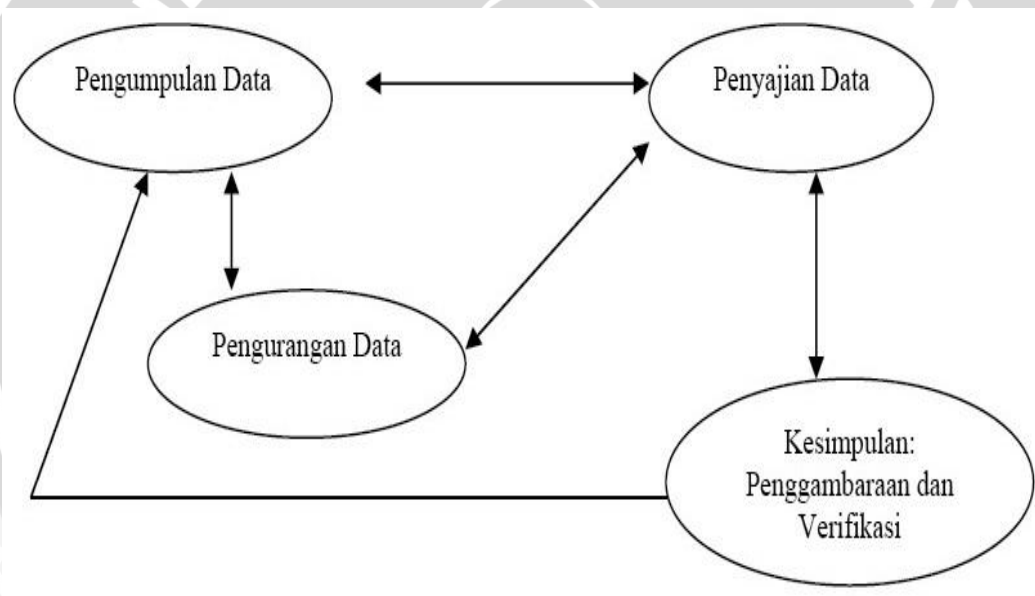
2. *Data Display* (Penyajian Data)

Berupa sekumpulan data yang nantinya akan diolah dan ditarik kesimpulan. Dalam penyajian data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah

dipahami tersebut. Dalam pendekatan kualitatif yang paling sering dilakukan untuk menyajikan data adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Conclusion Drawing/Verification

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.



Bagan 2. Komponen dalam analisis data (Sugiono, 2008: 247)